

---

---

# **KAJIAN KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN SINDANGKASIH, KABUPATEN CIAMIS, JAWA BARAT**

**ANNE CHARINA**

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

## **ABSTRACT**

One of the efforts taken to improve agriculture human resources especially farmers, is through agricultural extension activities. The purpose of agricultural extension is to create a competent farm community that is able to create a strong business, with better farming, better business, better living and better environment. To realize all that would be required special education efforts through the development of national agricultural extension system that is able to help farmers and other agricultural businesses to improve their livelihoods and improve their welfare.

This study aims to examine how the effectiveness of agricultural extension in general is happening in the District Sindangkasih post autonomy, as well as examine the extent of the impact of agricultural extension activities undertaken to contribute to the socio-economic conditions of farmers.

This research was conducted in the District Sindangkasih. This district is one of the districts with a large number of people working in the agricultural sector. This study uses a case study to obtain in-depth pattern of the object under study, with the approach of the PRA (Participatory Rural Appraisal) and FGD (Focus Group Discussion). The informants in this study is agricultural extension, related agencies and authorities, as well as farmers, who know for certain activities in Kec. Sindangkasih counseling. The draft analysis of the data used to answer the research question in this study is to use qualitative descriptive analysis method, by adopting the Kirkpatrick model of evaluation.

Based on the calculation Effectiveness of Agricultural Extension in Sub Sindangkasih obtained a score of 77.48%, which is classified in the category of a very good level of effectiveness. The positive impact is felt farmers with agricultural extension include the improvement of knowledge, skills and mindset, particularly related legowo planting system. On the economic changes that may result from an increase in production which impact on increasing farmers' income

Keywords: agricultural extension, Effectiveness, Social Economic Impact.

## **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penghasil devisa terbesar di Indonesia. Sayangnya hasil tersebut tidak serta merta mengangkat derajat petani sebagai pelaku utamanya. Mayoritas petani di negara kita masih merupakan petani gurem. Petani gurem atau petani kecil yang merupakan kontruksi terbesar dari masyarakat pedesaan ini sudah semestinya segera diberdayakan. Secara faktual, eksistensi petani gurem atau petani kecil di Indonesia masih sangat signifikan. Hasil Sensus Pertanian tahun 2012 menunjukkan bahwa presentase petani gurem (yang menguasai dan atau mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektar) terus bertambah, yakni dari 10,8 juta (52,7%) pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta

(56,5%) pada tahun 2003, dan menjadi 67,2 persen pada tahun 2004. Untuk Pulau Jawa, jumlah petani gurem ini meningkat dari 69,8 persen pada tahun 2003 menjadi 74,9 persen pada tahun 2010 (BPS,2013). Kecenderungannya, angka tersebut akan semakin meningkat seiring dengan semakin deras laju fragmentasi dan konversi lahan sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk, masih rendahnya manajemen dalam relasi pewarisan, semakin berkembangnya relasi penyakapan (*maro*) dalam pengusahaan lahan (*shared poverty*), belum membudayanya manajemen usahatani secara kolektif (*collective farming*) dan belum terwujudnya reformasi atau manajemen reformasi agraria secara adil.

Hal yang sama juga terlihat untuk kondisi sosial ekonomi lainnya, tingkat pendidikan sebagian besar petani gurem di Indonesia masih sangat rendah (45% tamat SD, 25% tidak tamat SD, dan 12% tidak sekolah), berusia tua (76,2% berusia 40-54 tahun dan 21,46% berusia di atas 56 tahun), berlahan sempit (rata-rata kurang dari 0,25 ha/kk), tingkat kualitas kesehatan rendah, bermodal kecil, dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi-kondisi tersebut jelas akan berdampak kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global, karena petani dengan skala kecil itu pada umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokal secara optimal yang selanjutnya akan berakibat pada rendahnya efisiensi usaha dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan (Herman Soewardi, 2004).

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan pertanian, masyarakat pertanian dibekali dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, paket-paket teknologi baru di bidang pertanian dengan sapa usahanya. Diantaranya penanaman nilai-nilai atau prinsip-prinsip agribisnis, mengkreasikan SDM dengan prinsip inovasi, yang lebih utamanya mengubah sikap masyarakat tani di pedesaan agar tau dan mau menerapkan informasi anjuran yang diberikan oleh penuluh dalam tujuannya meningkatkan tingkat keberhasilan usaha petani. Tujuan penyuluhan pertanian yaitu menciptakan masyarakat tani yang kompeten yang mampu menciptakan usaha yang tangguh, dengan *better farming, better business, better living dan better environment*. Untuk mewujudkan semua itu tentunya diperlukan usaha khusus penyuluhan melalui pembangunan sistem penyuluhan pertanian nasional yang mampu membantu petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya serta meningkatkan kesejahteraannya.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian sudah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada zaman Hindia Belanda menggunakan pendekatan atas perintah atau pendekatan dari atas (*top down*). Pada pemerintahan pendudukan Jepang pun masih menggunakan pendekatan dari atas, bahkan setelah kemerdekaan Pemerintah Indonesia masih juga menggunakan pendekatan dari atas, walaupun dalam perkembangannya kemudian mengalami berbagai modifikasi. Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai program pembangunan pertanian. Melalui program Bimbingan Massal (Bimas), penyuluhan pertanian dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang dilakukan melalui koordinasi yang ketat

antar instansi terkait tapi masih dengan menggunakan pendekatan dari atas yang dimodifikasi.

Keberhasilan penyuluhan pertanian yang demikian menimbulkan anggapan bahwa penyuluhan pertanian yang dilaksanakan selama ini dilakukan dengan pendekatan dipaksa, terpaksa dan biasa. Petani dipaksa untuk menerima teknologi tertentu, sehingga petani terpaksa melakukannya, dan kemudian petani menjadi biasa melakukannya, walaupun pada akhirnya petani meningkatkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan produksi padi yang diusahakan sehingga Indonesia mencapai swasembada beras.

Dalam era reformasi dan otonomi sekarang ini, penyuluhan pertanian yang menggunakan pendekatan dari atas tentunya sudah tidak relevan lagi, karena yang kita inginkan adalah bahwa petani dan keluarganya mengelola usaha taninya dengan penuh kesadaran, bukan terpaksa, mampu melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif yang ada, yang ditawarkan penyuluh pertanian dan pihak-pihak lain. Dengan pilihannya itu, petani yakin bahwa dia akan dapat mengelola usahataniya dengan produktif, efisien dan menguntungkan serta berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pilihan inilah, petani mendapatkan bantuan dari penyuluh pertanian dan pihak lain yang berkepentingan dalam bentuk hubungan kemitraan yang sejajar, sehingga tidak terjadi pemaksaan, namun pada era otonomi daerah justru muncul berbagai paradigma baru tentang penyuluhan pertanian. Peraturan yang ada membuat para penyuluh kebingungan dalam melaksanakan perannya, bahkan penyuluhan pertanian dipandang tidak berfungsi seperti seharusnya. Tahun 2006, revitalisasi penyuluhan pertanian dikumandangkan kembali, kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten dan kecamatan dihidupkan kembali, yang dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (SP3K), kelembagaan di Kabupaten berupa Badan pelaksana penyuluhan (Bapelluh) dan di kecamatan berupa BPPPK (BP3K).

Hal di atas dipertegas dengan SK Menteri Pertanian No. 157 yang isinya menyatakan bahwa dana dekonsentrasi dari pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota yang sudah membentuk Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (Deptan 2006). Sebagai contohnya di Kabupaten Ciamis Jawa Barat pada pelaksanaannya tidak ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang mengatur khusus tentang penyuluhan pertanian dan revitalisasinya, terbukti dengan tidak adanya kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat kabupaten sejak tahun 2001 hingga saat ini, padahal dalam SK Menteri no. 157 seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pemberian dana dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota yang sudah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian. Hal ini berpengaruh kurang baik terhadap jalannya kegiatan penyuluhan pertanian di setiap daerah di Kabupaten Ciamis. Salah satunya di Kecamatan Sindangkasih. Dalam keadaan seperti ini, para Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Sindangkasih, mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi aktivitas dan efektivitas penyuluhan pertanian.

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimanakah efektivitas penyuluhan pertanian secara umum yang terjadi di Kecamatan Sindangkasih pasca otonomi daerah, serta melihat sejauhmana dampak kegiatan penyuluhan pertanian yang

dilakukan mampu memberikan kontribusi terhadap kondisi sosial ekonomi petani”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar yang bekerja di sektor pertanian.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk memperoleh pola yang bersifat mendalam dari objek yang dikaji, dengan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) serta FGD (*Focus Group Discussion*). Adapun informan dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian, dinas terkait, dan aparat, serta petani, yang mengetahui secara pasti aktifitas penyuluhan di Kec.Sindangkasih.

Rancangan analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, dengan mengadopsi model Kirkpatrick evaluation. Model ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas program penyuluhan pertanian pada kelompok tani subur makmur Sindangkasih. Model ini merupakan model yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas program pelatihan, yang mana mencakup empat level evaluasi, diantaranya: *reaction, learning, behavior*, dan *result*. Sedangkan untuk melihat dampak penyuluhan pada kondisi sosial ekonomi petani, akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan petani. Bentuk penggalian informasi menggunakan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dan FGD (*Focus Group Discussion*) dimaksudkan untuk menggali solusi pada permasalahan secara partisipatif dengan para *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Ciamis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **➤ Efektifitas Program Penyuluhan Pertanian Pasca Otonomi Daerah di Kecamatan Cikoneng Kab.Ciamis**

Kegiatan penyuluhan pertanian pasca otonomi daerah mulai dilakukan di Kecamatan Sindangkasih pada tahun 2001. Keberhasilan penyuluhan pertanian sangat bergantung pada kemahiran seorang penyuluh dalam menyampaikan materi dan aplikasi yang dibutuhkan petani, oleh karena itu seorang penyuluh haruslah memiliki kualifikasi tertentu, baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memberikan penyuluhan yang profesional. Selain itu jumlah penyuluh di suatu wilayah juga mempengaruhi efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian, semakin banyak jumlah penyuluh di suatu wilayah maka kegiatan penyuluhan akan lebih efektif.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPL harus mempunyai acuan agar dapat bekerja dengan baik dan mencapai sasaran. Acuan kerja tersebut tersusun dalam rencana kerja penyuluh pertanian. Dalam situasi otonomi sekarang dan sebelumnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan bagi tugas dan tanggung jawab para penyuluh pertanian di Kecamatan Sindangkasih. Sebelum otda di Kecamatan Sindangkasih ada seorang Mantri tani dan 3 orang penyuluh pertanian yang bertugas. Ada garis pembagian tugas yang jelas antara seorang Penyuluh (PPL) dengan seorang Mantri tani yang membawahi 1 kecamatan, sedangkan

penyuluh berada di desa dengan membawahi 4 desa di kecamatan wilayahnya. Pembagian tugasnya antara lain hal-hal yang bersifat non teknis tanggungjawab seorang Mantri tani, sedangkan yang teknis tugas seorang Penyuluh.

Pada waktu itu seorang penyuluh tidak dibebani administrasi/laporan sama sekali, karena hal-hal yang terkait laporan maupun administrasi menjadi tanggung jawab seorang Mantri tani, termasuk dalam hal mencarikan bibit, pupuk, pestisida dan pemasaran hasil pertanian bukan termasuk tugas pokok seorang Penyuluh, namun sifatnya membantu seorang Mantri tani dalam menjalankan program Bimas /Inmas pada waktu itu, agar dengan hasil pertanian dapat dicapai dengan optimal termasuk dalam hal menjualnya.

Setelah memasuki era otonomi daerah, struktur dan jumlah penyuluh pertanian mengalami perubahan, Penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Sindangkasih pada saat ini yaitu 7 orang penyuluh, terdiri dari 5 orang penyuluh PNS dan 2 orang penyuluh THL yang dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan. Setelah memasuki era Otonomi Daerah (dimulai pada tahun 2001), tugas seorang penyuluh mulai remang-remang artinya tergantung daerah, dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah yang berwenang dalam memberi pembagian tugas tersebut. Tugas Pokok dan Fungsi penyuluh pada waktu itu hanya berbicara teknis, artinya bagaimana cara membuat persemaian padi unggul pada waktu itu, cara dan penggunaan pupuk buatan pabrik dan pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi. Pada pokoknya penyuluh pada saat itu hanya bertugas dan bertanggungjawab pada kegiatan operasional di lapangan melayani petani, tapi semenjak era otonomi daerah tugas dan tanggung jawab penyuluh bertambah yaitu merangkap tugas yang sebelumnya ditangani oleh mantri tani.

Setelah tahun 2001, di Kecamatan Sindangkasih sudah tidak ada lagi mantri tani yang bertugas. Semua tugas yang dilakukan petani pada saat itu dibebankan kepada penyuluh. Berikut pengukuran efektifitas Penyuluhan pertanian di Kelompok Tani Subur Makmur di Kec.Sindangkasih.

### **1. Reaksi (*Reaction*)**

#### **a. Bobot Materi yang Disampaikan**

Menurut petani, bobot dari materi yang disampaikan oleh penyuluh pada Kelompok Tani sudah baik, penyuluh memberikan pengetahuan seputar pertanian yang menambah pengetahuan petani. "Petani sudah berpengalaman, tetapi penyuluhan pertanian itu ada baiknya, bukan tanahnya yang diperluas tetapi tanamannya yang diatur, tanah mah kan ya gak bisa dilebarin, nah tanamannya yang diatur" tambah informan, menjelaskan tentang materi pola tanam legowo yang disampaikan penyuluh pertanian Kelompok Tani Subur Makmur.

#### **b. Kualitas dari Fasilitas yang Diberikan**

Dalam hal ini, fasilitas yang dimaksud peneliti adalah berupa fasilitas yang mendukung usaha tani petani, misalnya bantuan sarana produksi dan sebagainya. "Selalu ada neng, bantuan untuk kita mah sehabis penyuluhan, bibit dan kadang-kadang pupuk biasanya, cuma biasanya petani lebih suka menggunakan bibit sendiri, karena hasilnya lebih bagus" Kata Pak Dahim selaku ketua poktan. "Petani gak mau nurutin, pupuknya diambil, bibitnya diambil tapi padinya mah gitu-gitu aja, belum pada nanam legowo. Bapak teh juga kesel, kadang-kadang teh Ir. Iyan suka sebel gitu cerita sama Bapak, kenapa yang lain mah bibit diambil tapi nanamnya gitu-gitu aja, tidak seperti yang saya beritahukan" tambah Pak

Baban. Menurut pak Dahim, bibit yang diberikan biasanya diambil dari pabrik dan perlakuannya tidak sebaik perlakuan petani, bibit yang diberikan biasanya masih muda sudah diambil sehingga rentan rusak dan sulit tumbuh, hal ini menyebabkan petani banyak yang lebih memilih menggunakan bibit buatan sendiri, karena petani biasanya memilih calon bibit yang sudah tua.

#### **c. Strategi Pembelajaran yang Digunakan Penyuluh**

Strategi pembelajaran yang digunakan penyuluh sudah baik dan menyebabkan petani mudah mengerti. “Soalnya Pak Iyan (penyuluh) itu asli orang sunda, jadi bicaranya dengan bahasa sunda, jadi dikampung itu banyak orang sudah tua jarang bisa bahasa Indonesia, tapi karena dengan bahasa sunda jadi gampang dimengerti”.

#### **d. Penentuan Jadwal Pertemuan**

“Jadi kalau mau ada pertemuan gitu, terlebih-lebih udah dikasih tau sama petaninya neng, disini ketua kelompoknya siapa, misalnya bapak, bapak itu dipanggil kesana disuruh menghadap ke kecamatan, baru disana dikasih tau ke bapak, ini anggotanya pada sibuk gak, dikasih tau kalau akan ada pertemuan, dikasih tau sama Dia gitu” ungkap Pak Baban. Biasanya jadwal pertemuan diberitahukan 1-2 hari sebelum pertemuan, sehingga petani bisa mengosongkan waktu untuk mengikuti penyuluhan. Sejauh ini penentuan jadwal penyuluhan tidak ada masalah dan pemberitahuannya sudah baik.

#### **e. Media Pembelajaran yang Disediakan**

“Cuma ngomong-ngomong aja neng, gak pernah dipraktekan, seumpamanya di sawah baru dikasih tau gitu, kalau waktu penyuluhan mah ngomong-ngomong aja neng gak dicontohin” kata Pak Dahim. Menurut informan, penyuluh tidak menggunakan media pembelajaran dalam melakukan penyuluhan.

### **2. Pembelajaran (*Learning*)**

#### **a. Pembelajaran yang didapat menanggapi gagal panen**

Menurut informan, penyuluh belum memberikan pengetahuan mengenai langkah apa yang sebaiknya dilakukan dalam menghadapi gagal panen. Penyuluh selama ini hanya memberikan materi tentang teknik bercocok tanam, dan belum ada materi tentang penanganan gagal panen, sehingga belum ada tindakan yang bisa dilakukan petani dalam menangani gagal panen sampai saat ini.

#### **b. Peranan penyuluh dalam peningkatan pengetahuan petani seputar pertanian**

“Sekarang kita mah diajarinnya teh mengurangi penggunaan bahan kimia, ngajarinnya teh organik. Diterima pengetahuannya, tapi gak dilaksanakan sama kita teh, gak ada hasilnya neng, gak kerasa sama kita, padinya teh ga keluar jadi gak diterapin” Ungkap Pak Dahim. “

#### **c. Peranan penyuluh dalam peningkatan pengetahuan petani seputar pengembangan usaha tani**

Sama halnya dengan pembelajaran tentang menanggapi gagal panen, penyuluh selama ini hanya memberikan materi tentang teknik bercocok tanam, dan belum ada materi tentang pengembangan usaha tani, sehingga belum ada peningkatan yang disebabkan oleh perkembangan usaha tani tersebut.

#### **d. Peningkatan Pengetahuan dalam Bercocok Tanam**

Penyuluhan terakhir yang diberikan adalah tentang pola tanam legowo, sudah cukup bagus menambah wawasan petani. “Legowo ini banyak menguntungkan neng, dapetnya banyak, tikus juga jarang jadinya tapi gak semua

petani mau nerapin neng, namanya juga kebiasaan neng, susah ngeubahnya” Tandas Pak Baban.

### **3. Perubahan Sikap (*Behaviour*)**

#### **a. Penerapan Ilmu yang didapatkan**

Pak Dahim dan Pak Baban mengaku telah menerapkan pola tanam legowo dalam membudidayakan padi. Menurut informan, pola tanam legowo banyak menguntungkan petani, sehingga mereka menerapkannya.

#### **b. Penyampaian Ilmu yang Didapatkan kepada Petani Lain**

Menurut Pak Dahim, beliau sering membagi ilmu yang didapatkan kepada petani lainnya, walaupun terkadang petani lain tidak mau ikut menerapkannya. Akan tetapi, beliau sudah berupaya memberitahukannya kepada petani lainnya. “Petani itu hanya mendengar tidak mau melakukan, nanti dia teh nanya kamu dapat berapa, tapi udah dia teh gak mau nurutin neng” tambah Pak Baban.

### **4. Hasil Akhir (*Result*)**

#### **a. Peningkatan Produktivitas**

“Bapak punya sawah, kalau nanam biasa itu dapat 7-8 kuintal tapi kalau legowo bisa dapat sampai 1 ton neng” Tandas Pak Dahim. Penanaman padi dengan pola tanam legowo yang sudah diajarkan penyuluh terbukti dapat meningkatkan hasil panen padi.

#### **b. Peranan program dalam mengurangi gagal panen**

“Kalau legowo mah bisa mengurangi hama, tikus teh jarang ada, dikarenakan terbuka, jadi terang gitu, kalau terang gitu tikus gak mau, kalau yang nanamnya penuh jadi gelap gitu, kalau legowo lumayan neng tikus teh jadi berkurang” Ungkap Pak Dahim.

#### **c. Peningkatan Profit**

Profit yang didapat lumayan meningkat karena jumlah produksi juga meningkat. Pak dahim dan pak baban tidak menjelaskan detail peningkatannya, namun menurut mereka keuntungan pasti meningkat semenjak penerapan pola tanam legowo karena adanya penambahan hasil panen.

#### **d. Peningkatan kemampuan petani dalam bekerja sama**

Penyuluh tidak pernah memberikan materi tentang hal selain teknik tercocok tanam. Sehingga penyuluhan pertanian tidak berperan dalam pembentukan *teamwork* kelompok tani.

#### **e. Peningkatan solidaritas antar Petani**

Sama halnya dengan poin sebelumnya, petani tidak mengajarkan hal lain selain teknik bercocok tanam.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode likert dengan memberikan skala dari 1-3, dengan jumlah pertanyaan 16 pertanyaan yang dibuat berdasarkan model evaluasi kirkpatrick. Informan yang berasal dari kelompok tani subur makmur memberikan nilai 77,48% kepada penyuluhan pertanian yang dilakukan di kelompok tani tersebut. Kategori nilai tersebut tergolong pada tingkat efektivitas yang sangat baik. Akan tetapi, dari 4 indikator yang digunakan berdasarkan model evaluasi kirkpatrick, indikator pembelajaran (*learning*) mendapatkan nilai yang paling rendah dengan skor rata-rata 49,97% yang tergolong kurang baik, hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi kepada lembaga penyuluh, agar kiranya lebih mengelaborasi lagi pembelajaran yang harus disampaikan mengingat banyaknya poin pembelajaran yang belum dipenuhi pada sub indikator pembelajaran, seperti pembelajaran tentang penanganan paska gagal panen,

tentang pemasaran, dan peningkatan usaha tani lainnya guna meningkatkan efektivitas penyuluhan tersebut.

➤ **Dampak Penyuluhan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani**

Efektivitas suatu kegiatan penyuluhan dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku manusia (petani) yang menjadi sasarannya, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya. Perubahan perilaku ini dapat diamati pada:

- a. Perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan bertani yang mencakup macam dan jumlah sarana produksi serta peralatan/mesin yang digunakan, maupun cara-cara atau teknik bertaninya.
- b. Perubahan-perubahan tingkat produktivitas dan pendapatannya
- c. Perubahan-perubahan dalam pengelolaan usahatani (perorangan, kelompok, koperasi), serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari usahatannya.

Dengan kegiatan penyuluhan diharapkan akan memberikan dampak bagi kehidupan sosial (pegetahuan, keterampilan, dan pola pikir) dan kehidupan ekonomi (produksi dan pendapatan) petani. Dari studi kasus petani Sukamaju, Sindangkasih, program penyuluhan berfokus pada Program Penyuluhan Tata Cara Penanaman Padi dengan Sistem Legowo. Materi penyuluhan diberikan oleh Insinyur Iyan Rohiyon di kantor penyuluhan Sindangkasih. Penyuluhan Penanaman Padi Sistem Legowo disertai dengan praktek langsung di lapangan sehingga petani bisa langsung menerapkan materi penyuluhan. Hingga saat ini, petani Sukamaju Sindangkasih menerapkan pola tanam tersebut. Dari hasil wawancara terhadap responden, berikut dijelaskan dampak penyuluhan terhadap kondisi sosial petani:

**a. Peningkatan Pengetahuan**

Petani Sukamaju merasa dengan adanya penyuluhan mengenai pola tanam sistem legowo, pengetahuan mereka bertambah. Setelah diadakan penyuluhan petani Sukamaju yang pada awalnya menerapkan pola tanam padi secara tradisional kini beralih menanam padi dengan sistem legowo. Menurut responden, materi yang disampaikan penyuluh mudah dipahami serta diterapkan sehingga responden paham mengenai tata cara sistem legowo. Responden mengaku, pengetahuan yang didapat dari materi penyuluhan pola tanam sistem legowo antara lain: varietas unggul, sistem tanam legowo, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen. Tidak semua pengetahuan di adopsi oleh petani, untuk materi pemilihan varietas unggul yang disertai dengan pemberian subsidi bibit tidak di adopsi petani karena menurut responden bibit yang baik dengan produktivitas tinggi ialah bibit buatan mereka sendiri. Untuk selebihnya responden sudah cukup paham mengenai tata cara sistem legowo dan pengendalian hama penyakit sehingga memberikan keuntungan terhadap usahatani petani Sukamaju.

**b. Peningkatan Keterampilan**

Dengan adanya penyuluhan mengenai sistem legowo berdampak pada peningkatan keterampilan petani. Selain penyampaian materi, penyuluhan sistem legowo disertai dengan praktek langsung di lahan sawah. Hal tersebut membuat pemaparan materi lebih jelas dan lebih dapat dipahami. Output yang dihasilkan ialah petani pun menjadi lebih terampil dan lebih cermat dalam menanam padi

mengikuti aturan sistem legowo. Petani secara bertahap mengadopsi materi penyuluhan pola tanam sistem legowo. Langkah awal yang dilakukan ialah menerapkan tata cara penanaman sistem legowo barulah menerapkan materi lain seperti pengendalian hama penyakit. Petani mengaku dengan diterapkannya pola tanam sistem legowo, pengendalian hama penyakit menjadi lebih mudah.

### **c. Pola Pikir Berkembang**

Setelah mendapatkan materi penyuluhan, petani mulai membandingkan kinerja dan hasil dari materi penyuluhan dengan kinerja dan hasil berdasarkan petani. Kinerja dan hasil yang lebih menguntungkan itulah yang diterapkan. Responden mengaku penyuluhan harus disertai praktek di lapangan dan memperlihatkan hasil barulah petani percaya dan menerapkan materi penyuluhan. Materi penyuluhan yang sekiranya menguntungkan petani lah yang diterapkan sedangkan yang sekiranya kurang menguntungkan petani tetap mempertahankan cara lama berdasarkan pengalaman. Salah satu yang dibandingkan oleh petani ialah penggunaan bibit padi. Bibit padi yang diberikan penyuluh dirasa memproduksi padi lebih sedikit dibandingkan bibit hasil buatan sendiri. Disinilah pola pikir petani berkembang sehingga lebih cermat dalam membuat keputusan untuk usahatani yang berkelanjutan.

Materi penyuluhan akan diterapkan oleh petani jika sekiranya menguntungkan dibandingkan dengan berusaha sendiri berdasarkan pengalaman. Keuntungan yang didapat setelah menerapkan sistem legowo ialah peningkatan produksi yang disertai dengan peningkatan pendapatan.

Berikut ini merupakan uraian dampak penyuluhan terhadap ekonomi petani:

#### **a. Produksi**

Peningkatan dari segi produksi merupakan alasan petani untuk mengadopsi pola tanam sistem legowo ini. Menurut responden, ada peningkatan produksi yang cukup signifikan setelah menerapkan pola tanam sistem legowo. Sebelum menerapkan pola tanam sistem legowo produksi dari luas lahan 100 bata padi yang dihasilkan adalah 7-8 kwintal. Setelah menerapkan pola tanam sistem legowo produksi padi meningkat menjadi 1 ton. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani.

#### **b. Pendapatan**

Peningkatan produksi akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan. Menurut responden, pada luas lahan 100 bata sebelumnya hanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 3.000.000 setelah menerapkan pola tanam sistem legowo pendapatan yang dihasilkan Rp. 3.000.000 bahkan hampir menyentuh Rp. 4.000.000. Hal tersebut tentu menguntungkan petani sehingga responden mengaku akan menerapkan pola tanam sistem legowo secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil perhitungan Efektifitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Sindangkasih didapatkan skor 77,48%, dimana kategori tersebut tergolong pada tingkat efektivitas yang sangat baik.
2. Dampak positif yang dirasakan petani dengan adanya penyuluhan pertanian diantaranya adalah peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pola pikir, khususnya terkait sistem penanaman legowo. Di bidang ekonomi perubahan yang didapat adalah adanya peningkatan produksi yang berimbas pada peningkatan pendapatan petani.

## **SARAN**

1. Dari 4 indikator yang digunakan berdasarkan model evaluasi kirkpatrick, untuk mengukur efektifitas, indikator pembelajaran (*learning*) mendapatkan nilai yang paling rendah dengan skor rata-rata 49,97% yang tergolong kurang baik, hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi kepada lembaga penyuluh, agar kiranya lebih mengelaborasi lagi pembelajaran yang harus disampaikan mengingat banyaknya poin pembelajaran yang belum dipenuhi pada sub indikator pembelajaran, seperti pembelajaran tentang penanganan paska gagal panen, tentang pemasaran, dan peningkatan usaha tani lainnya guna meningkatkan efektifitas penyuluhan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Herman, Soewardi. 2004. *Nasib Sektor Pertanian Sebagai Tumpuan Pembangunan*. Bandung : Bakti Mandiri.
- Maman, Achmad. "Reorientasi Penyuluhan Pertanian Prasyarat Pertanian Kerakyatan"  
Melalui<<http://www.distan.pemdadiy.go.id/index.php?option=content&task=category&sectionid=1&id=17&Itemid=2>>[10-11-2005]
- Margono, Slamet. 2001. "Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah."Melalui:[margonoipb.files.wordpress.com/.../paradigma-penyuluhan-pertanian-di-era-otonami-daerah.doc](http://margonoipb.files.wordpress.com/.../paradigma-penyuluhan-pertanian-di-era-otonami-daerah.doc)
- Subejo. 2002. "Penyuluhan Pertanian Indonesia: Isu Privatisasi dan Implikasinya."  
*Jurnal Agroekonomi*.Melalui<<http://subejo.staff.ugm.ac.id/wp-content/privatisasi-penyuluhan.pdf>> [21/03/2009]